



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 196/DJU/OT1.6 /I/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2025 dan Persiapan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2026 di Lingkungan Peradilan Umum

Jakarta, 20 Januari 2026

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri
di seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6267/BP/PW.1.1.1/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025, dan untuk persiapan pengusulan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Umum tahun 2026 yang akan dilakukan paling lambat tanggal 31 Mei 2026, dengan ini disampaikan kepada satuan kerja yang akan mengusulkan evaluasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal “B” untuk menuju WBK dan minimal “BB” untuk menuju WBBM;
2. Capaian kinerja yang tercantum pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tercapai 100% dan kurang dari 110% ($100\% \leq x \leq 110\%$) dan lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya;
3. Sudah melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun;
4. Pimpinan satuan kerja berkomitmen dan memberikan teladan dalam integritas dan kedisiplinan pada hakim dan aparatur dalam satuan kerjanya;
5. Pimpinan melakukan pegawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan hakim dan aparatur pada satuan kerjanya, termasuk kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan;

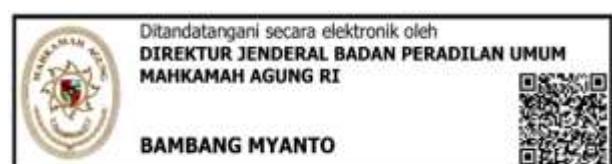


6. Pimpinan satuan kerja melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang memberikan pelayanan di wilayah satuan kerja, sehingga tidak adanya celah untuk terjadinya penyimpangan;
7. Pimpinan, Hakim dan aparatur pada satuan kerja memiliki pemahaman terhadap mekanisme pengaduan dan pengendalian gratifikasi;
8. Setiap standar operasional prosedur diterapkan secara optimal, termasuk penerapan keterbukaan informasi publik;
9. Penerapan area steril dilakukan secara optimal, sehingga tidak ada celah untuk terjadinya interaksi antara aparatur peradilan dengan pihak berperkara di luar persidangan;
10. Program dari agen perubahan dapat berdampak nyata terhadap perubahan budaya kerja dan dilaksanakan secara efektif;
11. Inovasi yang dimiliki benar-benar memiliki dampak nyata dan menjawab kebutuhan pengguna layanan serta memenuhi minimal salah satu kriteria, yaitu:
 - Mendorong peningkatan capaian kinerja utama;
 - Mendorong penguatan integritas serta mengatasi isu strategis;
 - Mendorong peningkatan kualitas layanan bagi pengguna layanan;
12. Melakukan monitoring dan publikasi pada inovasi yang dimiliki (contoh dalam Lampiran I);

Bagi satuan kerja yang akan mengajukan evaluasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, selain kriteria tersebut di atas, diharapkan juga melengkapi data dukung yang berkaitan dengan:

1. Inovasi unggulan satuan kerja yang telah berhasil direplikasi oleh satuan kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung. (Contoh dalam Lampiran II)
2. Pendampingan yang dilakukan terhadap satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. (Contoh dalam Lampiran III)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 196/DJU.1/UND.OT1.6/I/2026

Tanggal : 20 Januari 2026



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU



BerAKHLAK 

MONEV SPBE

NOVEMBER 2025

Prepared By:
Tim Monev SPBE
Pengadilan Tinggi Riau



PENGADILAN TINGGI RIAU



PT-RIAU.CO.ID



+62853-5800-0101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan menjadi sebuah keniscayaan bagi semua Aparatur Sipil Negara saat ini. Dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik pelayanan lebih efektif dan efisian, maka dalam pelaksanaannya perlu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala agar dalam pelaksanaannya dapat lebih maksimal.

Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh tim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 834/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE) Pengadilan Tinggi Riau. Monev terkait dengan Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik meliputi SIPP, SIKEP, Komdanas, SIWAS, e-BIMA, e-SADEWA, atau aplikasi inovasi pelayanan internal ataupun eksternal organisasi lainnya.

B. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana para pelaksana pada masing-masing unit kerja dapat memahami dan menggunakan aplikasi-aplikasi terkait dengan tupoksi masing-masing bagian.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pengadilan Tinggi Riau.
- c. Untuk melakukan penyempurnaan terhadap teknologi informasi apabila diperlukan.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik

C. Kegiatan yang dilaksanakan

Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan pada minggu ke IV atau pada akhir bulan atau pada minggu pertama bulan berikutnya dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti langsung saat error tersebut ditemukan atau pada bulan berikutnya.



BAB II
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PENGADILAN TINGGI RIAU
PERIODE BULAN NOVEMBER 2025

NO	APLIKASI	PERIHAL YANG DIMONITORING	HASIL MONITORING			KENDALA																												
A. BIDANG PROSES BISNIS UTAMA																																		
1	SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	Rasio Perkara	Periode	November 2025	Januari – November 2025																													
<table border="1"> <tr> <td>Perdata</td><td>:</td><td>47%</td><td>91%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pidana Biasa</td><td>:</td><td>53%</td><td>94%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pidana Tipikor</td><td>:</td><td>20%</td><td>83%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pidana Khusus Anak</td><td>:</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							Perdata	:	47%	91%				Pidana Biasa	:	53%	94%				Pidana Tipikor	:	20%	83%				Pidana Khusus Anak	:	100%	100%			
Perdata	:	47%	91%																															
Pidana Biasa	:	53%	94%																															
Pidana Tipikor	:	20%	83%																															
Pidana Khusus Anak	:	100%	100%																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th><th>Jenis Perkara</th><th>PDT</th><th>PID.B/ANAK</th><th>TPK</th><th>Nomor Perkara</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perkara Yang Belum Penetapan Majelis Hakim</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Kriteria	Jenis Perkara	PDT	PID.B/ANAK	TPK	Nomor Perkara		Perkara Yang Belum Penetapan Majelis Hakim	-	-	-	-	-															
Kriteria	Jenis Perkara	PDT	PID.B/ANAK	TPK	Nomor Perkara																													
Perkara Yang Belum Penetapan Majelis Hakim	-	-	-	-	-																													



		<table border="1"> <tr> <td>Perkara Yang Belum Penunjukkan Panitera Pengganti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Perkara Yang Belum Penetapan Hari Sidang</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Perkara Yang Belum Putusan Banding</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	Perkara Yang Belum Penunjukkan Panitera Pengganti	-	-	-	-	Perkara Yang Belum Penetapan Hari Sidang	-	-	-	-	Perkara Yang Belum Putusan Banding	-	-	-	-				
Perkara Yang Belum Penunjukkan Panitera Pengganti	-	-	-	-																	
Perkara Yang Belum Penetapan Hari Sidang	-	-	-	-																	
Perkara Yang Belum Putusan Banding	-	-	-	-																	
		<p>E-docs & Publikasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th><th>Jenis Perkara</th><th>PDT</th><th>PID.B/ ANAK</th><th>TPK</th><th>Nomor Perkara</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Belum Upload e-docs putusan pada SIPP</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Belum Upload e-docs putusan pada direktori putusan</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Kriteria	Jenis Perkara	PDT	PID.B/ ANAK	TPK	Nomor Perkara	Belum Upload e-docs putusan pada SIPP		-	-	-	-	Belum Upload e-docs putusan pada direktori putusan		-	-	-	-	
Kriteria	Jenis Perkara	PDT	PID.B/ ANAK	TPK	Nomor Perkara																
Belum Upload e-docs putusan pada SIPP		-	-	-	-																
Belum Upload e-docs putusan pada direktori putusan		-	-	-	-																
		<p>Rasio Perkara Hakim</p> <p>(Daftar Rasio Perkara Hakim terlampir)</p>	-																		
		<p>Rasio Perkara Panitera Pengganti</p> <p>(Daftar Rasio Perkara Panitera Pengganti terlampir)</p>	-																		
		Menu perdata banding, pidana banding, pidana anak dll	untuk semua user pengguna berjalan dengan baik, jika terjadi <i>maintanance/pemeliharaan</i> sudah diberitahukan dan diselesaikan oleh pihak terkait (Mahkamah Agung RI)																		
2	EIS	Detail Rasio Penanganan Perkara Periode Januari s.d. November 2025																			



		<p>Perdata</p> <p>RASIO PENANGANAN PERKARA 91% ↗</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025</td><td>227</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025</td><td>15</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>204</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>200</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>19</td></tr> </tbody> </table> <p>Pidana Biasa</p> <p>RASIO PENANGANAN PERKARA 94% ↗</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025</td><td>896</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025</td><td>86</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>807</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>835</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>58</td></tr> </tbody> </table> <p>Pidana Tipikor</p> <p>RASIO PENANGANAN PERKARA 83% ↗</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025</td><td>20</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025</td><td>7</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>16</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>19</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> <p>Pidana Khusus Anak</p> <p>RASIO PENANGANAN PERKARA 100% ↗</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025</td><td>22</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>20</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>21</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	227	2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	15	3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	204	4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	200	5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	19	1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	896	2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	86	3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	807	4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	835	5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	58	1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	20	2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	7	3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	16	4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	19	5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	4	1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	22	2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	1	3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	20	4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	21	5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	-	
1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	227																																																													
2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	15																																																													
3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	204																																																													
4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	200																																																													
5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	19																																																													
1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	896																																																													
2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	86																																																													
3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	807																																																													
4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	835																																																													
5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	58																																																													
1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	20																																																													
2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	7																																																													
3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	16																																																													
4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	19																																																													
5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	4																																																													
1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	22																																																													
2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	1																																																													
3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	20																																																													
4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	21																																																													
5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 30.11.2025	-																																																													
3	E-BERPADU	Penahanan Tingkat Banding	(Monev Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terlampir dalam lampiran)																																																												



		Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)																							
		Laporan Banding Penahanan Pasal 27 ayat (1)	<i>(Monev Pasal 27 ayat (1) terlampir dalam lampiran)</i>																						
		Pidana Upaya Banding Secara Elektronik	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Eletronik</th> <th>Total</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agustus</td> <td>131</td> <td>150</td> <td>87,33%</td> </tr> <tr> <td>September</td> <td>52</td> <td>54</td> <td>96,30%</td> </tr> <tr> <td>Oktober</td> <td>57</td> <td>58</td> <td>98,28%</td> </tr> <tr> <td>November</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Bulan	Eletronik	Total	%	Agustus	131	150	87,33%	September	52	54	96,30%	Oktober	57	58	98,28%	November	98	98
Bulan	Eletronik	Total	%																						
Agustus	131	150	87,33%																						
September	52	54	96,30%																						
Oktober	57	58	98,28%																						
November	98	98	100%																						

B. BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1	SIKEP	Kelengkapan Data SIKEP	<i>(Daftar Kelengkapan Data SIKEP terlampir)</i>																			
		Kelengkapan e-Doc SIKEP	<i>(Daftar Kelengkapan e-Doc SIKEP terlampir)</i>																			
		Menu presensi online, profil pegawai, administrasi pegawai, dll	untuk semua user pengguna berjalan dengan baik, jika terjadi <i>maintanance/pemeliharaan</i> sudah diberitahukan dan diselesaikan oleh pihak terkait (Mahkamah Agung RI)																			
2	E-VAKIP	✓ Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah Jenis Perkara</th> <th>Jml. Perkara Putus</th> <th>Jml. Tepat Waktu</th> <th>Jml. Tidak Tepat Waktu</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perdata</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Pidana</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Jumlah Jenis Perkara	Jml. Perkara Putus	Jml. Tepat Waktu	Jml. Tidak Tepat Waktu	%	Perdata	17	17	0	100%	Pidana	68	68	0	100%	
Jumlah Jenis Perkara	Jml. Perkara Putus	Jml. Tepat Waktu	Jml. Tidak Tepat Waktu	%																		
	Perdata	17	17		0	100%																
Pidana	68	68	0	100%																		



		<table border="1"> <tr> <td>Pidana Khusus</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100%</td></tr> </table>	Pidana Khusus	1	1	0	100%					
Pidana Khusus	1	1	0	100%								
<p>✓ Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Jumlah</th><th>Jml. Pemberitahuan Putusan</th><th>Jml. Perkara Kasasi</th><th>Jml. Perkara Tidak Kasasi</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</td><td>86</td><td>26</td><td>60</td><td>69,77%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Indikator	Jumlah	Jml. Pemberitahuan Putusan	Jml. Perkara Kasasi	Jml. Perkara Tidak Kasasi	%	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	26	60	69,77%	
Indikator	Jumlah	Jml. Pemberitahuan Putusan	Jml. Perkara Kasasi	Jml. Perkara Tidak Kasasi	%							
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	26	60	69,77%								
<p>✓ Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Jumlah</th><th>Jml. Laporan IKM</th><th>Nilai Persepsi IKM</th><th>Konversi Interval IKM</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</td><td>1</td><td>3.95</td><td>98,74</td><td>98,74%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Indikator	Jumlah	Jml. Laporan IKM	Nilai Persepsi IKM	Konversi Interval IKM	%	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	1	3.95	98,74	98,74%	
Indikator	Jumlah	Jml. Laporan IKM	Nilai Persepsi IKM	Konversi Interval IKM	%							
Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	1	3.95	98,74	98,74%								
<p>✓ Persentase Salinan Putusan Perkara yang di Kirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Jumlah</th><th>Jml. Salinan Putusan Dikirimkan</th><th>Jml. Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu</th><th>Jml. Salinan Putusan Tidak Tepat Waktu</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Persentase Kirim Salinan Putusan Tepat Waktu</td></tr> </tbody> </table>		Jumlah	Jml. Salinan Putusan Dikirimkan	Jml. Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Jml. Salinan Putusan Tidak Tepat Waktu	%						Persentase Kirim Salinan Putusan Tepat Waktu
	Jumlah	Jml. Salinan Putusan Dikirimkan	Jml. Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Jml. Salinan Putusan Tidak Tepat Waktu	%							
					Persentase Kirim Salinan Putusan Tepat Waktu							



		Jenis Perkara					
		Perdata	17	17	0	100%	
		Pidana	64	64	0	100%	
		Pidana Khusus	1	1	0	100%	
3	E-VAKIP PN Sewilayah PT Riau	E-VAKIP telah direplikasi kepada seluruh PN menyesuaikan indikator kinerja utama pada PN	<ul style="list-style-type: none"> Perlu ditinjau dan dicek data terkait eksekusi dan diversi, rumus untuk indikatornya perlu disesuaikan Pelajari dan analisis terkait IKU terbaru yang telah dikeluarkan oleh MA 				Apakah perlu kita Kembangan lagi evakip menyesuaikan dengan IKU terbaru atau menunggu badilum karena evakip akan dinasionalkan oleh Badilum ?
4	SATRIA	SATRIA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Riau) merupakan aplikasi yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi berkala implementasi SAKIP mulai dari Tahapan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal satuan kerja diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau	<ul style="list-style-type: none"> Untuk semua user pengguna dapat mengakses SATRIA Pelajari dan analisis terkait IKU terbaru yang telah dikeluarkan oleh MA (karena data SATRIA untuk pengukuran kinerja sinkron datanya dengan E-VAKIP) 				
5	e-performance	Aplikasi internal untuk membantu dalam proses	Untuk semua user pengguna berjalan dengan baik, telah berjalan untuk Sebagian user pegawai				



		Pengukuran Kinerja Pegawai (PKP)		
6	e-ptsp PT Riau	Aplikasi internal terkait dengan tata kelola persuratan pada Pengadilan Tinggi Riau	<ul style="list-style-type: none"> Migrasi surat masuk data dari eptsp PT Riau ke PTSP+ Badilum (<i>Done ✓</i>) 	
7	PTSPPlus Badilum	Aplikasi tata kelola persuratan dari Badilum. Pengadilan Tinggi Riau salah satu <i>pilot project</i> untuk implementasi PTSPPlus ini.	<ul style="list-style-type: none"> untuk semua user pengguna berjalan dengan baik, tetapi ada <i>double job</i>, kendala penginputan 2 (dua) kali ini telah diatasi dengan cara migrasi surat masuk data dari eptsp PT Riau ke PTSP+ Badilum (<i>Done ✓</i>) Penggunaan surat 	Untuk kedepannya perlu dipikirkan terkait dengan penerapan salah satu aplikasi, jadi hanya menggunakan PTSPPlus Badilum
8	SAKTI	Modul-modul yang ada pada aplikasi sakti (cth: Aset tetap, GI & Pelaporan, dll)	untuk semua user pengguna berjalan dengan baik, jika terjadi <i>maintanance/pemeliharaan</i> sudah diberitahukan dan diselesaikan oleh pihak terkait (kementerian keuangan)	
9	KOMDANAS	Menu sub bagian keuangan, perencanaan, kepegawaian dan umum.	untuk semua user pengguna berjalan dengan baik, jika terjadi <i>maintanance/pemeliharaan</i> sudah diberitahukan dan diselesaikan oleh pihak terkait (Mahkamah Agung RI)	
10	SIMAN	Modul-modul yang ada pada aplikasi Siman(cth: Master Aset, Pengelolaan, wasdal, dll)	untuk semua user pengguna berjalan dengan baik, jika terjadi <i>maintanance/pemeliharaan</i> sudah diberitahukan dan diselesaikan oleh pihak terkait (Kementerian Keuangan)	



11	E-BIMA	Modul-modul yang ada pada aplikasi e-Bima	Aplikasi berjalan dengan baik	
12	E-SADEWA	Modul-modul yang ada pada aplikasi e-Sadewa	Aplikasi berjalan dengan baik	
13	JDIH	Upload Kebijakan terkait dengan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Riau	Aplikasi berjalan dengan baik	Perlu dilakukan updating data pada aplikasi JDIH

C. BIDANG PELAYANAN PUBLIK

1	SIWAS	Menu Pengaduan (cth: list laporan, delegasi, pendaftaran dll)	untuk semua user pengguna berjalan dengan baik, jika terjadi <i>maintanance/pemeliharaan</i> sudah diberitahukan dan diselesaikan oleh pihak terkait (Mahkamah Agung)	
2	TUANKU ONLINE	Pemberian layanan Hukum/konsultasi online	Jumlah Penerima Layanan : 0 Pelayanan Fitur yang perlu dikembangkan/ Diperbaiki :	Pada bulan November tidak ada yang mengajukan permohonan layanan konsultasi hukum secara online
		Pemberian layanan Hukum/konsultasi offline	Jumlah Penerima Layanan : 49 Pelayanan Fitur yang perlu dikembangkan/ Diperbaiki :	Berjalan lancar



3	SMART PTSP	Layanan Penyumpahan Advokat	Jumlah Penerima Layanan : 2 Organisasi Advokat Fitur yang perlu dikembangkan/ diperbaiki :	Berjalan lancar
		Layanan Izin Riset	Jumlah Penerima Layanan : 1 Permohonan Fitur yang perlu dikembangkan/ diperbaiki :	Pada bulan November tidak ada yang mengajukan permohonan Layanan Izin Riset
		Layanan Izin Magang/Kerja Praktik	Jumlah Penerima Layanan : 11 Permohonan. Fitur yang perlu dikembangkan/ diperbaiki :	Berjalan lancar
		Layanan Virtual PTSP	Jumlah Penerima Layanan : 1 Pelayanan.. Fitur yang perlu dikembangkan/ diperbaiki :	Berjalan lancar
		Layanan Permintaan Informasi melalui chatbot	Jumlah Penerima Layanan : 8 Pertanyaan. Fitur yang perlu dikembangkan/ diperbaiki :	Berjalan lancar



4	Website dan Media Sosial Lainnya	Standarisasi website pengadilan di lingkungan Peradilan Umum	Wesite Pengadilan Tinggi Riau telah mempedomani Standarisasi website pengadilan di lingkungan Peradilan Umum	
		Konten dan fitur pada website	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konten pada website telah update dengan informasi-informasi dan berita terbaru 2. Fitur-fitur dan menu pada website dapat diakses dengan baik, tidak terdapat bug (error) 	
		Konten pada media sosial lainnya, seperti : Instagram, Facebook, whatsapp, youtube	Konten pada media sosial telah update dengan informasi-informasi dan berita terbaru dilengkapi dengan narasi berita	



BAB III

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pengadilan Tinggi Riau untuk Bulan November 2025 telah dilaksanakan dengan baik, namun kedepannya harus selalu melakukan inovasi dan perbaikan peningkatan pelayanan secara kontinu dalam rangka mempermudah kinerja dan akses pelayanan kepada internal organisasi maupun kepada Masyarakat.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada periode Bulan November 2025 ini dibuat, dengan harapan menjadi bahan pertimbangan perbaikan implementasi SPBE kedepannya.

Pekanbaru, 8 Desember 2025

Ketua Tim SPBE

Sukri Sulumin



LAMPIRAN

CONTOH



A. Lampiran Bidang Proses Bisnis Utama

1. SIPP

- Daftar Rasio Perkara Hakim

No.	NAMA HAKIM	STATISTIK					
		SISA LALU	DITERIMAKAN	BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	RASIO
1	ABDUL HUTAPEA, SH., MH	23	157	180	174	6	97 %
2	ASMAR, S.H., M.H.	11	166	177	164	13	93 %
3	DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.	25	217	242	227	15	94 %
4	DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.	19	167	186	177	9	95 %
5	DR. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.	0	4	4	4	0	100 %
6	DR. DAHLAN, S.H., M.H.	0	121	121	107	14	88 %
7	DR. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.	2	10	12	12	0	100 %
8	DR. HJ. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.	0	4	4	4	0	100 %
9	ENDRABAKTI HERIS SETIAWAN, S.H.	0	139	139	125	14	90 %
10	HENDRI, S.H., M.H.	4	12	16	14	2	88 %
11	JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.	0	137	137	124	13	91 %
12	LILIN HERLINA, S.H., M.H.	12	172	184	170	14	92 %
13	MIAN MUNTE, S.H., M.H.	23	185	208	196	12	94 %
14	MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.	12	181	193	183	10	95 %



No.	NAMA HAKIM	STATISTIK					
		SISA LALU	DITERIMAKAN	BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	RASIO
15	MURNI ROZALINDA, S.H., M.H.	0	36	36	25	11	69 %
16	RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.	0	25	25	15	10	60 %
17	SAIMAN, S.H., M.H.	0	32	32	25	7	78 %
18	SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.	21	198	219	196	23	89 %
20	TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.	1	4	5	5	0	100 %
21	TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.	8	195	203	187	16	92 %
22	YUS ENIDAR S.H., M.H.	14	177	191	180	11	94 %

- Daftar Rasio Perkara Panitera Pengganti

No.	NAMA PANITERA PENGGANTI	STATISTIK					
		SISA LALU	MASUK	BEBAN	MINUTASI	SISA AKHIR	RASIO
1	AMINAH, S.H.	0	6	6	1	5	17 %
2	AZWIR, S.H.	4	53	57	57	0	100 %
3	DENNI SEMBIRING, S.H., M.H.	5	52	57	55	2	96 %
4	EFENDI, S.H.	0	6	6	1	5	17 %
5	I.A.N.RATNAYANI, SH, MH	2	32	34	30	4	88 %
6	JAFRI ZEN, S.H.	0	10	10	8	2	80 %
7	JUSLAK ARTHUR LANIFANIK BALUKH, S.H.	6	68	74	74	0	100 %



No.	NAMA PANITERA PENGGANTI	STATISTIK					
		SISA LALU	MASUK	BEBAN	MINUTASI	SISA AKHIR	RASIO
8	LINDA SRIYANTI	6	59	65	60	5	92 %
9	M. JAMALIS, S.H.	3	31	34	34	0	100 %
10	MANIDAR, S.H., M.H.	4	49	53	51	2	96 %
11	MELIANA, S.H.	3	66	69	62	7	90 %
12	MF.EVA JUNIAR SIMAMORA, SH	3	69	72	65	7	90 %
13	NETTY RIAMA, S.H., M.H.	4	64	68	64	4	94 %
14	REHULINA BR BRAHMANA, S.H.	6	70	76	73	3	96 %
15	ROSDIANA SITORUS, S.H.	3	63	66	60	6	91 %
16	RUSTAM, S.H.	3	62	65	60	5	92 %
17	SINTA HERAWATI, SH	5	49	54	52	2	96 %
18	SINTA ROIDA RITONGA, S.H.	6	56	62	56	6	90 %
19	SUYATNO, S.H., M.H.	7	71	78	74	4	95 %
20	ZULHELMI, S.H.	4	63	67	65	2	97 %



B. Lampiran Bidang Administrasi Pemerintahan

1. SIKEP

- Daftar Kelengkapan Data SIKEP

MONITORING KELENGKAPAN DATA SIKEP													TOTAL 12 ITEMS.	
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	CPNS	PNS	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN	TOTAL	(-) CPNS	(-) PNS	(-) PANGKAT	(-) JABATAN	(-) PENDIDIKAN	
1	400492 - Pengadilan Tinggi Riau	93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
2	400141 - Pengadilan Negeri Bangkinang	59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
3	098853 - Pengadilan Negeri Bengkalis	52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
4	400327 - Pengadilan Negeri Dumai	50	100%	100%	100%	98%	100%	99%	0	0	0	1	0	
5	662990 - Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
6	098849 - Pengadilan Negeri Pekanbaru	97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
7	477255 - Pengadilan Negeri Pelalawan	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
8	098860 - Pengadilan Negeri Rengat	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
9	477261 - Pengadilan Negeri Rokan Hilir	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
10	477343 - Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
11	401908 - Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
12	098874 - Pengadilan Negeri Tembilahan	44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	



- Daftar Kelengkapan e-Doc SIKEP

MONITORING KELENGKAPAN E-DOC SIKEP													TOTAL 12 ITEMS.	
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	CPNS	PNS	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN	TOTAL	(-) CPNS	(-) PNS	(-) PANGKAT	(-) JABATAN	(-) PENDIDIKAN	
1	400492 - Pengadilan Tinggi Riau	93	100%	100%	100%	100%	99%	99%	0	0	0	0	1	
2	400141 - Pengadilan Negeri Bangkinang	59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
3	098853 - Pengadilan Negeri Bengkalis	52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
4	400327 - Pengadilan Negeri Dumai	50	100%	100%	100%	98%	100%	99%	0	0	0	1	0	
5	662990 - Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
6	098849 - Pengadilan Negeri Pekanbaru	97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
7	477255 - Pengadilan Negeri Pelalawan	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
8	098860 - Pengadilan Negeri Rengat	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
9	477261 - Pengadilan Negeri Rokan Hilir	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
10	477343 - Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
11	401908 - Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
12	098874 - Pengadilan Negeri Tembilahan	44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 196/DJU.1/UND.OT1.6/I/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

229/



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**

JLN. TANJUNG RIA NO. 98 BASE "G" Jayapura Telp. (0967)541248, Fax (0967) 541045
JAYAPURA - PAPUA

Nomor : 562/KPT.W30-U/RA1.10/VI/2025

Jayapura, 18 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Replikas Aplikasi EVAKIP

**Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Jalan Jend. Sudirman No. 315
di -
Pekanbaru**

Sehubungan dengan rencana replikasi Aplikasi EVAKIP Pengadilan Tinggi Riau sebagai inovasi untuk penguatan integritas, layanan dan kinerja dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2025, bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat memberikan izin kepada kami untuk mereplikasi inovasi pada Pengadilan Tinggi Riau yaitu aplikasi EVAKIP dan mentransfer pengetahuan dalam implementasi gagasan dari inovasi tersebut kepada kami agar dapat diterapkan di Pengadilan Tinggi Jayapura.

Kami sangat mengapresiasi keberhasilan implementasi aplikasi EVAKIP di Pengadilan Tinggi Riau, kami yakin bahwa dengan mengadopsi aplikasi yang sama, Pengadilan Tinggi Jayapura dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Dalam hal ini, mohon kesediaan Pengadilan Tinggi Riau untuk:

1. Memberikan informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, fitur dan manfaat dari aplikasi EVAKIP;
2. Memberikan izin untuk melakukan studi banding secara daring terkait implementasi aplikasi tersebut;
3. Menyediakan dukungan teknis selama proses implementasi aplikasi tersebut di Pengadilan Tinggi Jayapura.

Kami berharap permohonan ini dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,
Djaniko M.H. Girsang, J.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka
Telp / Fax. (0717) 439351, 439352
Email : pt_babel@yahoo.co.id Website : www.pt-babel.go.id
PANGKAL PINANG 33148

Nomor : 2075/KPT.W7-U/RA1.3/IX/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Permohonan Izin Replikasi
Aplikasi EVAKIP**

Pangkalpinang, 30 September 2025

Yth. **Ketua Pengadilan Tinggi Riau**
Jalan Jend. Sudirman No. 315

Di
Pekanbaru

Sehubungan dengan rencana replikasi Aplikasi EVAKIP Pengadilan Tinggi Riau sebagai inovasi untuk penguatan integritas, layanan dan kinerja dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawas atas hasil LHE SAKIP tahun 2024 di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2025 dan memenuhi eviden AMPUH dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, bersama ini dimohon kiranya Ibu dapat memberikan izin kepada kami untuk mereplikasi inovasi pada Pengadilan Tinggi Riau yaitu aplikasi EVAKIP dan mentransfer pengetahuan dalam implementasi gagasan dari inovasi tersebut kepada kami agar dapat diterapkan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Kami sangat mengapresiasi keberhasilan implementasi aplikasi EVAKIP di Pengadilan Tinggi Riau, Kami yakin bahwa dengan mengadopsi aplikasi yang sama, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Dalam hal ini, mohon kesediaan Pengadilan Tinggi Riau untuk:

1. Memberikan informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, fitur dan manfaat dari aplikasi EVAKIP;
2. Memberikan izin untuk melakukan studi banding secara daring terkait implementasi aplikasi tersebut;
3. Menyediakan dukungan teknis selama proses implementasi aplikasi tersebut di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Ibu diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Artha Theresia





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id

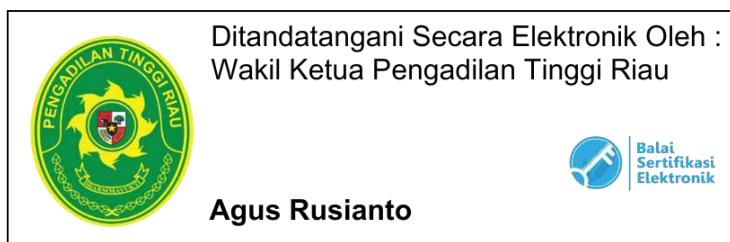
Nomor : 370/WKPT.W4-U/RA1.1/X/2025 Pekanbaru, 2 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Replikasi Aplikasi EVAKIP

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
di Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru,
Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah,
Kepulauan Bangka Belitung

Sehubungan dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 2075/KPT.W7-U/RA1.3/IX/2025 tanggal 30 September 2025 hal sebagaimana pokok surat di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima permohonan tersebut, untuk jadwal dan sistem Studi Banding yang akan dilaksanakan dapat menghubungi *contact person* sebagai berikut :

Nama : ROBY HIDAYAT, S.T., M.H.
NIP : 198412042009041005
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Tinggi Riau
Nomor Handphone : 08127611023

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sebagai laporan;
3. Arsip.



LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 196/DJU.1/UND.OT1.6/I/2026

Tanggal : 20 Januari 2026



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 167/DJU/UND.OT1.6/VII/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rapat Koordinasi Persiapan Desk
Evaluation – Wawancara Satuan
Kerja Menuju Berpredikat Wilayah
Bersih dari Korupsi (WBK).

Jakarta, 18 Juli 2025

- Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri
(daftar undangan terlampir)
3. Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
di Tempat

Sehubungan dengan Pengumuman Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2821/BP/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 14 Juli
2025 tentang Hasil Penilaian *Desk Evaluation* – Analisis Dokumen Lembar Kerja
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025, maka
bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk menghadiri rapat koordinasi yang akan
dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 21 Juli 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Online: Zoom Meeting
Meeting ID: 873 2792 9680
Passcode: badilum25
Acara : Rapat Koordinasi Persiapan *Desk Evaluation* –
Wawancara Satuan Kerja Menuju Berpredikat Wilayah
Bersih dari Korupsi (WBK).

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka diharapkan kehadiran
Saudara/i dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja Saudara/i
tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



LAMPIRAN I
Surat Undangan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum
Nomor : 167/DJU.1/UND.OT1.6/VII/2025
Tanggal : 18 Juli 2025

DAFTAR UNDANGAN

Pengadilan Tinggi

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Pengadilan Tinggi Makassar

Pengadilan Negeri

1. Pengadilan Negeri Bangli
2. Pengadilan Negeri Banjarbaru
3. Pengadilan Negeri Banjarmasin
4. Pengadilan Negeri Bengkalis
5. Pengadilan Negeri Blora
6. Pengadilan Negeri Boyolali
7. Pengadilan Negeri Bulukumba
8. Pengadilan Negeri Cianjur
9. Pengadilan Negeri Jantho
10. Pengadilan Negeri Kudus
11. Pengadilan Negeri Lubuk Basung
12. Pengadilan Negeri Karawang
13. Pengadilan Negeri Marabahan
14. Pengadilan Negeri Ngabang
15. Pengadilan Negeri Purwakarta
16. Pengadilan Negeri Rembang
17. Pengadilan Negeri Sekayu
18. Pengadilan Negeri Semarapura
19. Pengadilan Negeri Siak Indrapura
20. Pengadilan Negeri Sinabang
21. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
22. Pengadilan Negeri Unaaha



LAMPIRAN II
Surat Undangan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum
Nomor : 167/DJU.1/UND.OT1.6/VII/2025
Tanggal : 18 Juli 2025

**JADWAL SIMULASI DESK EVALUATION – TAHAP WAWANCARA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK TAHUN 2025**

Hari, Tanggal	Waktu	Satuan Kerja	Zoom Meeting
Senin, 21 Juli 2025	10.00 - 10.45 WIB	PN Sekayu	<i>Meeting ID:</i> 873 2792 9680 <i>Passcode:</i> badilum25
	11.00 - 11.45 WIB	PN Siak Sri Indrapura	
	13.00 - 13.45 WIB	PT Makassar	
	14.00 - 14.45 WIB	PN Sinabang	
	15.00 – 15.45 WIB	PN Tanjung Jabung Timur	
Selasa, 22 Juli 2025	09.00 – 09.45 WIB	PT Banda Aceh	
	10.00 - 10.45 WIB	PN Unaaha	
	11.00 - 11.45 WIB	PN Semarapura	
	13.00 - 13.45 WIB	PN Bulukumba	
	14.00 - 14.45 WIB	PN Karawang	
Rabu, 23 Juli 2025	09.00 – 09.45 WIB	PN Bengkalis	<i>Meeting ID:</i> 883 7439 0765 <i>Passcode:</i> zibadilum
	10.00 - 10.45 WIB	PN Blora	
	11.00 - 11.45 WIB	PN Boyolali	
	13.00 - 13.45 WIB	PN Cianjur	
	14.00 - 14.45 WIB	PN Jantho	
Kamis, 24 Juli 2025	09.00 – 09.45 WIB	PN Banjarmasin	
	10.00 - 10.45 WIB	PN Banjarbaru	
	11.00 - 11.45 WIB	PN Bangli	
	13.00 - 13.45 WIB	PN Marabahan	
	14.00 - 14.45 WIB	PN Ngabang	
Jum'at, 25 Juli 2025	09.00 – 09.45 WIB	PN Kudus	
	10.00 - 10.45 WIB	PN Lubuk Basung	
	11.00 - 11.45 WIB	PN Purwakarta	
	13.00 - 13.45 WIB	PN Rembang	





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id

Nomor : 742/KPT.W4-U/UND.TI1.1.1/VI/2025 Pekanbaru, 26 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja
Lolos Seleksi Administrasi

Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;
 2. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan;
 3. Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Tempat

Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja yang Lolos Seleksi Administrasi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Rapat tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : Pukul 13:00 WIB s.d. Selesai
Media : *Zoom Meeting*
Meeting ID : 898 4290 3275
Passcode : rakorzi25

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

